

# PESERTA DIDIK BERKEPRIBADIAN MUSLIM; IMPLEMENTASI KARAKTER BERBASIS NILAI PANCASILA

**Emma Wahidah**

MTs Miftahul Huda, Sukabumi

Submitted: 18-02-2024

Accepted: 25-02-2024

Published: 30-03-2024

## **Abstract**

*This research aims to examine the values of Pancasila as the basis of the nation's philosophy and its relevance to the principles of Islamic teachings which are implemented in the Independent Curriculum-based education process which is translated into the Project for Strengthening the Pancasila Student Profile (P-5). The type of research used is library research with a qualitative approach. The results of this research show that basically, educational reconstruction is sought as an alternative solution to educational problems considering that various problem factors will accompany the development of the dynamics of the nation's life. Pancasila which is integrated with the Islamic dimension will form a concept that is more synergistic to build higher quality education through the following points: 1) The One Godhead; Principles of Aqidah and Hablun Minallah, 2) Just and Civilized Humanity; Hablun Minannaas, 3) Unity of Indonesia; Ukhuwah, 4) Democracy Led by Wisdom in Representative Deliberations; Mudzakarah and Shura, and; 5) Social Justice for All Indonesian People; 'Is.*

**Keywords:** *Pancasila Values, P-5, Islamic Education, Characterization*

---

**\*Corresponding author**

wahidahemma9935@gmail.com

ISSN: 2986-5883

## PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa dilihat dari sistim pendidikannya. Karena itu, menurut al-Thantawi, pendidikan dibangun untuk kepentingan bangsa. Urgensi pendidikan tidak sebatas pada kegiatan untuk mengajarkan pengetahuan, namun juga diarahkan untuk membentuk kepribadian dan menanamkan patriotisme atau *hubbul wathan* (Ramayulis dan Samsul Nizar, 2005). Berbagai upaya dan inovasi sudah banyak dilakukan dalam rangka membangun kehidupan yang lebih bermutu. Dalam hal ini, revitalisasi pendidikan diyakini mampu merealisasikan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Usaha meningkatkan mutu pendidikan terus diupayakan, salah satunya melalui pelaksanaan pembaharuan kurikulum sebagai bagian integral dalam pendidikan.

Beberapa kasus transformasi pendidikan telah dilakukan oleh Depdiknas antara lain pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Sekolah Menengah Pertama (SMP) terbuka, Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Guru Pamong, Sekolah Persiapan Pembangunan, Sekolah Kecil, Sistim Pengajaran Modul, Sistim Belajar Jarak Jauh dan lain-lain. Bahkan di antara pembaharuan tersebut, Depdiknas melakukan sistim kerjasama multilateral yang melibatkan lembaga-lembaga asing seperti British Council, USAID, Unesco, UNICEF, JICA, ADB, World Bank dan lain sebagainya (Arif Rahman, 2009).

Hingga kini, pembaharuan tersebut tidak pernah usai diupayakan demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Rahman, 2009).

Kemudian pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis kurikulum prototipe yang selanjutnya disahkan menjadi Kurikulum Merdeka dengan membawa konsep bertema kebebasan belajar peserta didik dengan model *Project Based Learning*. Dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, Kurikulum Merdeka dilaksanakan sebagai penyempurna program pemulihan pendidikan. Kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran dengan sistem kemandirian berpikir. Pada penerapan pembelajaran, pendidik dan peserta didik diberi kebebasan untuk berinovasi dalam mewujudkan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan dan mandiri. Selain itu, implementasi kurikulum merdeka bertujuan untuk mewujudkan karakter peserta didik yang beriman kepada Tuhan serta dengan menjaga nilai-nilai budaya bangsa Indonesia (Yulian Rizki Nurhantara dan Ratnasari Dyah Utami, 2023).

Kurikulum Merdeka memiliki kerangka dan ciri khas yaitu diselenggarakannya program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau disingkat menjadi P5. P5 diterapkan melalui pendekatan *Project Based Learning* dalam pembelajaran lintas disiplin ilmu agar peserta didik dapat memperhatikan dan memberikan solusi terhadap setiap problem di lingkungannya (Annisa Intan Maharano, dkk, 2023).

Beberapa penelitian serupa telah dilakukan. Dalam penelitiannya, Maulida (2022) menemukan bahwa implementasi nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila Kurikulum Merdeka dapat dilakukan melalui pembiasaan di sekolah misalnya dengan membaca do'a sebelum

memulai pembelajaran dan shalat dhuha setiap hari ketika masuk sekolah. Utami (2022) mendapatkan temuan bahwa guru PAI memandang positif terhadap konsep Merdeka Belajar yang memberi kebebasan belajar sesuai potensi belajar peserta didik. Terakhir, Ibad (2021) memaparkan bahwa dimensi Profil Pelajar Pancasila selaras dengan nilai-nilai agama Islam memiliki tiga nilai; nilai *aqidah*, nilai *akhlak*; dan nilai *syari'ah*.

Secara garis besar, penelitian di atas menunjukkan fleksibilitas kurikulum sebagai solusi dalam membantu memecahkan sederet problem yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas yang ada. Selanjutnya, berkenaan dengan konteks keagamaan, program pelaksanaan P5 yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam akan lebih mampu menyentuh wilayah metafisik dalam unsur Ilahiyah yang terefleksikan dalam ranah Iman, Islam dan Ihsan. Dalam hal ini, penggunaan model kurikulum yang integratif memungkinkan peserta didik untuk mendapat pengalaman belajar yang religius sesuai pengembangan dimensi Profil Pelajar Pancasila.

## **METODE**

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber buku dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas. Menurut Abdul Rahmat Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang terdapat di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen dan catatan kisah-kisah sejarah. Sementara itu, Zed Mestika memaparkan bahwa penelitian pustaka atau riset pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan

mencata serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

Tujuan dari dilakukannya studi kepustakaan ialah untuk mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir dan menentukan dugaan sementara atau hipotesis penelitian sehingga peneliti dapat mengklasifikasikan, mengalokasikan, mengorganisasikan serta menggunakan variasi pustaka dalam bidang “Peserta Didik Berkepribadian Muslim; Implementasi Karakter Berbasis Nilai Pancasila”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Problem Penerapan Pendidikan Karakter di Indonesia***

Pendidikan diinterpretasikan lebih dari sekedar pengajaran karena dalam kenyataannya, pendidikan merupakan proses suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu. Dengan kesadaran tersebut, kekayaan budaya atau pemikiran diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga menjadi inspirasi dalam setiap aspek kehidupan. Pada proses ini, penekanan pendidikan ditekankan kepada pembentukan dan pengembangan kepribadian sehingga terjadi perluasan makna dari sekedar pelatihan (M. Nurul Ikhsan Saleh, 2012).

Kendati demikian, pendidikan adalah dunia yang amat kompleks. Sejumlah problem timbul seiring laju perkembangan kehidupan. Diasumsikan bahwa kemudahan dalam mengakses internet turut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan. Adanya tuntutan (*expectation*) yang lebih tinggi dari realitas yang terjadi juga turut mewarnai ragam permasalahan pendidikan bangsa. Misalnya, sekolah menghendaki tercapainya tujuan instruksional pendidikan melalui penerapan visi dan misi. Namun secara praktis,

target tersebut tidak mampu diperoleh secara optimal karena terbentur permasalahan lain seperti rendahnya efisiensi sistem pendidikan secara internal di sekolah tersebut.

Menurut Arif Rahman, timbulnya problem pendidikan selain bersumber dari tujuan pendidikan juga bersumber dari terjadinya perubahan sosial-budaya yang semakin cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan struktur pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, pergeseran nilai dan pengaruh globalisasi (Arif Rahman, 2009).

Berkenaan dengan hal di atas, persoalan terkait perilaku merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan dalam pendidikan. Paling tidak, secara eksplisit, Abdul Majid memaparkan bahwa terdapat lima aspek yang menjadi tantangan pendidikan dalam era globalisasi, di antaranya (Abdul Majid, 2012):

a. Krisis Moral-Akhlak

Kemerosotan akhlak bangsa disebabkan oleh banyak faktor, seperti pengaruh globalisasi, krisis ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya (Majid, 2012). Dalam hal ini, masyarakat tidak bisa serta merta menyatakan bahwa timbulnya krisis moral dan akhlak disebabkan gagalnya penyelenggaraan pendidikan di sekolah formal. Seringkali, penyimpangan terhadap perilaku justru banyak dipengaruhi oleh faktor luar.

Sebagai contoh, di sekolah, anak akan diajarkan tentang sopan santun, toleransi, kejujuran, rasa hormat dan lain sebagainya. Akan tetapi, pada lingkungan kehidupan yang lebih luas, anak justru menjumpai hal yang berbeda. Perilaku korupsi, memeras, menipu, hedonisme, *flexing*, berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan di sekolah. Kejahatan-kejahatan semacam alkoholis, brutal, fanatik, arogansi, berkelahi, tindak kekerasan dan lain sebagainya telah menjamur dan menjadi problem yang begitu lumrah terjadi di dalam

negeri. Jika dibiarkan, maka kondisi tersebut akan berdampak lebih besar bahkan berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Suatu ungkapan hikmah mengatakan, “*Maju bangsa karena akhlak, akhlak rusak hancurlah bangsa*”. Sukses tidaknya suatu bangsa mencapai tujuan hidupnya tergantung atas komitmen tidaknya bangsa itu terhadap nilai-nilai akhlak. Jika ia berkomitmen terhadap akhlak, maka bangsa tersebut akan sukses. Sebaliknya, manakala jika ia abai terhadap dimensi akhlak, maka bangsa tersebut akan binasa (Departemen Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009).

Menyikapi hal tersebut, dapat kita sadari bahwa tanggungjawab dalam membina kepribadian peserta didik bukan hanya tugas warga sekolah, sinkronisasi antara tiap lembaga pendidikan yang mencakup pendidikan formal, in-formal dan non-formal akan begitu membantu dalam menekan tindak penyimpangan perilaku.

#### b. Disorientasi Fungsi Keluarga

Keluarga adalah peletak dasar utama dan pertama pendidikan seorang anak sebelum melanjutkan pada institusi pendidikan formal (Ramayulis dan Nizar, 2005). Di beberapa situasi, watak dan perilaku anak cenderung didominasi oleh pola asuh keluarganya. Namun belakangan ini, orang tua yang seharusnya bertindak sebagai pembimbing dan pengontrol tata perilaku anak justru kurang mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Saat ini, tidak sedikit orang tua yang bekerja dan berprofesi di luar rumah sehingga di beberapa kesempatan, anak-anak akan kehilangan sosok yang seharusnya mampu menjaga kesehatan, kejiwaan, spiritual, jasmani, emosional dan sosialnya. Rumah yang seharusnya menjadi *basecamp* untuk mendukung dinamika intelektual dan emosional anak cenderung mengalami ketimpangan. Akibatnya, banyak anak-anak akan melampiaskan kegiatan di luar rumah. Lebih

jauh, anak dengan tingkat stabilitas emosi yang rendah akan terjerumus pada hal-hal negatif bahkan tanpa disadari orang tuanya sekalipun.

### c. Lemahnya *Learning Society*

Dalam rangka mencapai kehidupan sosial yang seimbang, maka manusia harus menciptakan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Keseimbangan tersebut menjadi jaminan bagi setiap individu untuk dapat hidup layak, damai dan tenteram (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2009). Akan tetapi, seiring dengan era globalisasi, sikap individualitas semakin menguat dan gaya interaksi antar individu berjalan fungsional. Hal tersebut telah berakibat pada lemahnya peran serta masyarakat dalam pembelajaran di lingkungan keluarga (Majid, 2012).

Pada batasan ini, *Learning Society* berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam aspek pendidikan. Oleh karena tujuan pendidikan diarahkan untuk mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia, maka secara praktis pendidikan tidak bisa diartikan sebagai kompetisi antar lembaga sehingga akan memberatkan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas (Mulyawan S. Nugraha, 2011). Masyarakat perlu diperlakukan atau diposisikan sebagai subyek pendidikan. Itulah sebabnya, model pemberdayaan masyarakat perlu diperkenalkan (Qodry Azizy, 2003).

Pendidikan harus bekerja sama dengan sistem lain untuk mewujudkan cita-cita masyarakat madani Indonesia. Namun selama ini, prinsip kesetaraan masih belum banyak diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran pendidikan formal, dalam artian sekolah mendapat perhatian dalam porsi yang besar sementara pendidikan in-formal dan nonformal justru tidak banyak mendapat



perhatian bahkan cenderung terabaikan. Perlu disadari bahwa pendidikan merupakan suatu ranah yang terbuka dan senantiasa berinteraksi dengan masyarakatnya. Dalam relevansinya dengan kehidupan sosial, pendidikan merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan sumber yang berpengaruh seperti keluarga, sekolah, media massa dan dunia usaha (Nugraha, 2011).

#### d. Menguatnya Paham Sekuler dan Liberal

Adanya pembaharuan dalam kehidupan mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma pendidikan. Istilah pembaruan merupakan terjemahan dari istilah *tajdid* atau modernisasi (Jamal Fakhei, 2012). Dalam situasi ini, berbagai ideologi Barat seperti sekularisme dan liberalisme turut mempengaruhi format tradisi keilmuan dan dinamika pendidikan, termasuk dalam hal pendidikan Islam. Sekularisme didefinisikan sebagai pembebasan manusia dari kungkungan agama dan kemudian dari kungkungan metafisika yang mengatur akal dan bahasanya (Khalif Muammar, 2010).

Dengan membanjirnya ideologi-ideologi pendidikan kontemporer Barat yang hampir semuanya berlatar filsafat pendidikan sekuler yakni liberalisme dan pragmatisme, begitu besar dirasakan pengaruhnya di berbagai dimensi kehidupan (Achmadi, 2010). Pada hakikatnya, Islam mengakui prinsip keterpaduan kekuasaan agama dan politik (Ahmad Suhelmi, 2002), sebab di dalam Islam hal yang spiritual dan temporal bukanlah merupakan dua bidang yang berbeda (Muhammad Iqbal, 1971) sehingga tidak pernah dikenal doktrin dua buah pedang (spiritual dan temporal) sebagaimana yang dikenal di Barat. Dua wilayah (keduniawian dan keakhiratan; ilmu pengetahuan (sains) dan ketuhanan) terintegrasikan pada arus pragmatik pendidikan (Gunawan dan Ibnu Hasan, 2015).

#### e. Masih Kuatnya Manajemen Patriarki

Tingkat akuntabilitas sebuah kelembagaan dapat dilihat daripada aspek manajerialnya. Saat ini, sering kita jumpai betapa manajemen kekeluargaan masih banyak dipraktikkan dalam mekanisme penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut mengandung makna bahwa setiap *stakeholder* di sekolah tersebut dipegang oleh satu anggota-kerabat tertentu secara sentralistik tanpa memberdayakan masyarakat.

Ikatan obyektif dan pemetaan tugas semacam itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika dibiarkan, maka akan mengakibatkan hilangnya sinergi kerja, kewenangan yang tumpang tindih bahkan tidak jarang menjadi pemicu timbulnya konflik (Mujamil Qomar, 2007). Terlebih jika ditunjang oleh sistim birokrasi yang kaku tidak jarang dijadikan sebagai alat kekuasaan atau alat politik bangsa. Pada ranah yang lebih luas, birokrasi di atas menjadi lahan subur tumbuhnya budaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sehingga akan mengganggu prestasi dan profesionalisme (Azizy, 2003).

#### *Aspek-Aspek Pengembangan P-5*

Penghidupan pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam kontkes pendidikan diarahkan untuk memenuhi kepentingan afeksi. Namun selama ini, pendidikan Pancasila justru banyak dianggap sebagai bagian dari materi pada mata pelajaran dimensi kewarganegaraan atau dimensi sosial yang diaktualisasikan secara insidental.

Jika ditilik lebih dalam, substansi nilai Pendidikan Pancasila diarahkan untuk membentuk masyarakat yang memiliki perilaku, wawasan, sikap dan tindakan sesuai falsafah hidup Pancasila. Karena itu, Pendidikan Pancasila menjadi tuntutan penyelenggaraan lebih besar di luar sekolah (Yim Peneliti DIY, tt).

Ditinjau dari aspek yuridis, secara fundamental, Nasution mengemukakan bahwa tujuan pendidikan nasional bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 dirumuskan oleh pemerintah sebagai pedoman bagi tujuan-tujuan pendidikan yang lebih khusus (Nasution, 1994). Tujuan tersebut salah satunya tertera dalam TAP MPR No. 1/MPR/1998 tentang GBHN dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan Pendidikan Nasional paling terkini. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter dan kompetensi peserta didik (<https://kurikulum.kemendikbud.go.id/kurikulum-merdeka/> diakses pada tanggal 24 September 2023 pukul 12.50 WIB).

Yaya Suryana dan Rusdiana memaparkan bahwa dengan segala perbedaan yang ada, pendidikan di Indonesia mengandung amanat untuk menjadikan warga belajar yang memiliki empat karakter pokok yaitu manusia beragama, manusia sebagai pribadi, manusia sosial dan manusia sebagai warga bangsa (Yaya Suryana dan A. Rusdiana, 2015). Adapun secara terperinci, Profil pelajar Pancasila dibangun atas enam elemen dengan sub-elemen masing-masing yang terdiri dari:

- a. Beriman, Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia

Ciri Profil Pelajar Pancasila yang pertama merupakan hal terpenting untuk diterapkan karena sehebat-hebatnya manusia, apabila tidak menerapkan sikap beriman kepada Tuhan maka akan sia-sia (Kahfi, 2022). Dimensi ini merupakan elemen yang berhubungan dengan unsur Ilahiyah dan mengandung makna bahwa beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar Indonesia yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan

Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Unsur kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam Profil Pelajar Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Akhlak beragama,
- 2) Akhlak pribadi,
- 3) Akhlak kepada manusia,
- 4) Akhlak kepada alam,
- 5) Akhlak bernegara.

#### b. Berkebhinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa.

Unsur kunci berkebhinekaan global pada Profil Pelajar Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan menghargai budaya
- 2) Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama
- 3) Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan global.

#### c. Bergotong-Royong

Dimensi berkebhinekaan pada P-5 mengandung pemahaman bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Menurut Irawati, gotong-royong dalam penerapan

Profil Pelajar Pancasila diarahkan agar peserta didik menyadari bahwa keberhasilan tidak dapat tercapai tanpa adanya bantuan atau peran dari orang lain (Irawati, 2022).

Unsur kunci gotong-royong pada Profil Pelajar Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kolaborasi (kerjasama), yakni saling membantu dan menolong sesama
- 2) Kepedulian, yakni sikap penting yang perlu dimiliki untuk menggerakkan perilaku gotong-royong
- 3) Berbagi, yakni sikap yang membutuhkan latihan, karena berbagi merupakan sikap mulia yang dapat mewujudkan indikator gotong-royong dalam Profil Pelajar Pancasila.

#### d. Mandiri

Dalam KBBI, mandiri diartikan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan seseorang yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Sementara itu, P-5 mengandung substansi bahwa pelajar mandiri merupakan pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Mulyadi dan Syahid menyatakan bahwa kemandirian tidak dibentuk secara mendadak, melainkan dilakukan dengan pembiasaan dari masa kanak-kanak. Terwujudnya sikap mandiri dapat memotivasi diri sendiri untuk berprestasi dan melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Yulian Rizki Nurhantara dan Ratnasari Dyah Utami, 2023).

Unsur kunci mandiri pada Profil Pelajar Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

- a) Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi
- b) Regulasi diri.

e. Bernalar kritis.

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara obyektif memproses informasi baik kuantitatif maupun kualitatif, membangun keterikatan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Dalam menyelesaikan masalah, kemampuan bernalar kritis peserta didik dapat dilakukan secara sistematis, logis dan analisis (Nurhantara dan Utami, 2023).

Unsur kunci bernalar kritis pada Profil Pelajar Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan
- 2) Menganalisis dan mengevaluasi penalaran
- 3) Merefleksi pemikiran dan proses berpikir
- 4) Mengambil keputusan.

f. Kreatif

Pada dimensi ini, pelajar diarahkan untuk memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna dan bermanfaat.

Unsur kunci kreatif pada Profil Pelajar Pancasila dirumuskan sebagai berikut

- 1) Menghasilkan gagasan yang orisinal
- 2) Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal (<https://kurikulum.kemendikbud.go.id/kurikulum-merdeka/> diakses pada tanggal 24 September 2023 pukul 13.10 WIB).

***Peserta Didik Berkepribadian Muslim; Implementasi Karakter Berbasis Nilai Pancasila***

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila mengantarkan masyarakat Indonesia memiliki suatu akhlak atau etika dalam tujuan hidup. Suatu perkara dapat dikatakan bernilai manakala berguna, berharga

(memiliki nilai kebenaran dan nilai estetika), baik (moral dan etis) dan memiliki nilai agama/religius (Kansil, 2000).

Pendidikan Islam, sebagai sub-sistem pendidikan Nasional tidak terpisahkan dari ideologi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara substansial tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam (Achmadi, 2010). Singkatnya, secara tidak langsung, pendidikan Islam dan ideologi Pancasila memiliki keterpaduan yang harmonis. Dengan demikian, dua aspek tersebut dapat saling terintegrasikan untuk menciptakan rancangan bangun visi dan misi pendidikan tanpa ada perselisihan.

Berkenaan dengan hal di atas, pengamalan nilai keislaman dapat dilakukan secara subyektif relevan dengan prinsip-prinsip yang terkandung pada P-5 melalui serangkaian kegiatan pembelajaran di sekolah berdasarkan asas-asas ideologi bangsa yang mencakup:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa; Asas *Aqidah* dan *Hablun MinAllah*

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yaitu Allah, pencipta segala segala yang ada dan semua makhluk. Sedangkan Yang Maha Esa berarti Yang Maha Tunggal, tidak sekutu; esa dalam Dzat-Nya, esa dalam sifat-Nya, esa dalam perbuatan-Nya. Dzat Tuhan tidak terdiri dari dzat-dzat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah yang paling sempurna. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pemahaman keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa (Darji Darmodiharjo, 2001). Perbuatan taat terhadap Tuhan diwujudkan dengan tindakan mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Selanjutnya, aktualisasi sila pertama dalam ranah pendidikan dapat dilakukan melalui penanaman budaya Islami, seperti contoh, pembacaan do'a dan *Asmaul Husna* sebelum atau sesudah dimulai pembelajaran, pembiasaan shalat dhuha, shalat jamaah, tadarus al-Qur'an dan lain sebagainya. Kemudian, penguatan unsur Ilahiyah di atas dapat ditunjang melalui penciptaan suasana

religius melalui momen-momen Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di lingkungan sekolah.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; *Hablun Minannaas*

Secara terperinci, substansi yang terkandung pada sila kedua memuat dua unsur, yaitu: Pertama, perlakuan manusia secara adil bermakna tidak memihak dan berpegang teguh kepada kebenaran. Kedua, beradab mengandung makna berbudi luhur, sopan dan bersusila (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tt). Dalam pandangan agama Islam, manusia memiliki harkat yang sama di sisi Allah. Yang membedakannya ialah iman, akhlak dan ketakwaannya (Palmawati Tahir, 2018).

Perhatian terhadap aspek kemanusiaan dalam pendidikan akan sangat relevan dengan budaya senyum, sapa, salam, sopan, santun (5S) terhadap seluruh warga sekolah tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Sementara pada proses pembelajaran, setiap guru harus mampu menerapkan perlakuan yang tidak membeda-bedakan dan memberi arahan kepada peserta didik untuk menghormati yang lebih tua, menghargai sesama serta menyayangi yang lebih muda. Selain itu, hendaknya guru memberikan hak yang sama kepada peserta didik dalam menyampaikan aspirasi, menanggapi, memberi apresiasi atau memberi sanksi yang sama ketika terjadi penyalahan aturan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-2 juga dapat dilakukan melalui pembinaan dalam memupuk rasa peduli. Indikator kepedulian peserta didik dapat dilihat dari kemauan dalam membantu dan menolong sesama, mengingatkan tentang adanya tugas, berbagi pemahaman kepada teman yang belum memahami materi tertentu dan lain sebagainya.



c. Persatuan Indonesia; *Ukhuwah*

Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang, sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu bendera Negara, satu bahasa Negara, satu lambang Garuda Pancasila serta satu Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014). Dalam proses mencapai Indonesia merdeka, persatuan Indonesia berperan sebagai faktor kunci, sumber semangat dan sumber motivasi dalam mencapai Indonesia Merdeka (Kaelan, 2022).

Kesatuan dan persatuan dalam al-Qur'an diinterpretasikan pada term *Ummatan Wahida* (umat atau kelompok yang bersatu). Nilai persatuan perlu diinternalisasikan untuk agar peserta didik memiliki kecintaan terhadap bangsa. Nilai persatuan di lingkungan pendidikan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas kelompok, berlatih memecahkan masalah secara sehat dan menyenangkan (*problem solving*) dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan.

Kegiatan lain yang dilakukan untuk menanamkan cinta tanah air ialah dengan mengembangkan sikap gotong royong dalam menjaga dan merawat kebersihan lingkungan sekolah. Selain itu, penguatan nilai persatuan Indonesia dapat diajarkan pada kegiatan upacara bendera seperti berpakaian rapi sesuai aturan, cara hormat yang tepat dan mengikuti upacara dengan tertib.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan; *Mudzakarah dan Syura*

Musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu *syawara* yang memiliki arti rembuk, mengatakan atau berunding. Arti dari musyawarah-mufakat pada sila keempat begitu kental dengan prinsip demokrasi. Meskipun dilakukan secara terbuka, pada prinsipnya, demokrasi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Sementara itu, sekolah merupakan zona yang di dalamnya terdapat banyak individu yang memiliki latar, kondisi, karakter dan sifat yang berbeda. Karena itu, perbedaan menjadi sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan. Pada situasi ini, peserta didik harus dibekali oleh pemahaman tentang pentingnya sikap saling menghormati, termasuk di dalamnya menghargai pendapat orang lain yang cenderung berbeda. Semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan selanjutnya bisa tampak dalam pembentukan struktur organisasi di sekolah dan kelas yang disertai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pemangku kepentingan.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; '*Adalah*

Di kehidupan masyarakat, keadilan memperoleh sebuah *statement* bukan berarti sama, namun meletakkan sesuatu pada tempatnya. Akan tetapi, sila kelima ini tidak bisa dimaknai sebagai sekedar pernyataan, lebih jauh, keadilan sosial mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan hidup bersama. Di dalam sila kelima mengandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (Kaelan, 2018). Keadilan sosial ialah menerapkan masyarakat pada kedudukan yang sama dalam hukum dan hak sebagai warga negara. Di samping itu, memiliki kesempatan yang sama terhadap akses publik yang mencakup kesehatan,

perumahan, jaminan sosial, pekerjaan sosial; dan pendidikan (Sa'adiah al-Batawi, 2018).

Al-Qur'an mengindikasikan sikap adil lebih dekat kepada takwa. Sikap adil adalah yang menegakkan langit dan bumi (Aidh al-Qarni, 2008). Konteks sila ke-5 merupakan sebuah dimensi yang mengajarkan peserta didik untuk keseimbangan hak dan kewajibannya. Dalam hal ini, pembinaan yang dilakukan cenderung mengarah kepada aspek fisiologis yang mana pendidik harus mampu menghadapi peserta didik sesuai proporsi, kebutuhan dan tingkat perkembangannya. Kemudian, peserta didik pun diberi arahan bagaimana cara menghadapi individu, termasuk di dalamnya menumbuhkan sikap kesediaan untuk bergaul dan berteman dengan siapapun tanpa memilih-milih.

## **SIMPULAN**

Pada hakikatnya, visi dan misi yang terkandung dalam ideologi bangsa sejalan dengan esensi agama Islam secara menyeluruh. Artinya, sikap cinta tanah air dapat ditunjang dengan sikap religius secara sinergis tanpa ada perselisihan. Keterpaduan antara dua arah tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya dalam rangka menjaga integritas, harkat dan martabat bangsa serta mempertahankan keutuhan NKRI relevan dengan syari'at Islam.

Secara substansial, Pancasila mengandung nilai-nilai universal luhur yang diinterpretasikan dalam nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemanusiaan dan kerakyatan serta keadilan. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dewasa ini diterjemahkan pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang berfungsi sebagai rujukan utama untuk mengarahkan kebijakan pendidikan sekaligus menjadi acuan bagi para pendidik dalam membangun karakter dan kompetensi peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sementara itu, pendidikan adalah wahana paling efektif untuk memperoleh sebuah pembelajaran. Implementasi karakter peserta didik yang Islami berbasis Pancasila dapat diaktualisasikan dalam keterpaduan; 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; Asas *Aqidah* dan *Hablun Minallah*, 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; *Hablun Minannaas*, 3) Persatuan Indonesia; *Ukhuwah*, 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan; *Mudzakarah dan Syura*, dan; 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; 'Adalah pada format program pendidikan itu sendiri, baik setiap lingkungan pendidikan yang mencakup pendidikan formal, informal maupun nonformal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. (2010). *Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Batawi, Sa'adiah. (2008). *Islam dan Restorasi Pancasila*. Jakarta: Saluni.
- Al-Qarni, Aidh. (2008). *Tafsir Miyassar*. Jilid I. Terj. Qisthi Press. Jakarta: Qisthi Press.
- Azizy, Qodry. (2003). *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Cox, Harvey. (1965). *The Secular City*. New York: ttp. dalam Muhammad Naquib al-Attas. *Islam and Secularism*. Terj. Khalif Muammar. dkk. 2010. *Islam dan Sekularisme*. Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan.
- Darmodiharjo, Darji. dkk. (1991). *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Fakhri, Jamal. (2012). *Modernisasi Pendidikan Islam*. Ciputat: UIN Jakarta Press.

Gunawan dan Ibnu Hasan. 2015. *Percikan Pemikiran Pendidikan Islam; Antologi Konfigurasi Pendidikan Masa Depan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<https://kurikulum.kemendikbud.go.id/kurikulum-merdeka/> diakses pada tanggal 24 September 2023 pukul 12.50 WIB.

<https://kurikulum.kemendikbud.go.id/kurikulum-merdeka/> diakses pada tanggal 24 September 2023 pukul 13.10 WIB.

Iqbal, Muhammad. (1971). *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Ashraf.

Kansil, C.S.T. (2000). *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Lilia bin Salem. *La Nation de Pouvoir dans L'Oevre D'Ibnu Khaldun dalam Ahmad Suhelmi*. (2002). *Polemik Negara Islam*. Jakarta: Teraju.

Maharani, Annisa Intan, dkk. (2023). *Program P5 sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka; Faktor Penghambat dan Upayanya*. *Jurnal Penelitian*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Bahan Tayang Materi Sosialisasi*. (Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945. NKRI dan Bhineka Tunggal Ika).

Majid, Abdul. (2012). *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. (1994). *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugraha, Mulyawan S. (2011). *Potret Ideal Guru Madrasah*. Sukabumi: Mulya Sejahtera Nugraha.

Nurhantara, Yulian Rizki dan Ratnasari Dyah Utami. (2023). *Implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Berbasis Merdeka*. *Jurnal Penelitian*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Ttp.
- Qomar, Mujamil . (2007). *Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Pendidikan Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyakarta.
- Ramayulis dan Samsul Nizar. (2005). *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam; Mengenal Tokoh Pendidikan di Dunia Islam dan Indonesia*. Jakarta: PT. Ciputat Press.
- S., Kaelan M. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- S., Kaelan M. (2022). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Saleh, M. Nurul Ikhsan. (2012). *Peace Education*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suhelmi. (2002). *Polemik Negara Islam*. Jakarta: Teraju.
- Suryana, Yaya dan A. Rusdiana. (2015). *Pendidikan Multikultural; Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tahir, Palmawati. (2018). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Tim Peneliti DIY. (Tt). *Pancasila; Pendidikan dan Kehidupan Bangsa*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. (2009). *Ilmu dan Aplikasi Pendidika*. Jilid IV. Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama.
- Hoerudin, H., Yanti Amalia Afifah, & Sugenda, S. (2023). ANALISIS PENYEBAB DEGRADASI MORAL REMAJA. *TA'DIB: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 15–27. Retrieved from <https://tadib.staimasi.ac.id/index.php/IT/article/view/16>